

DINAMIKA PERJUANGAN MUSLIM PATANI (TINJAUAN HISTORIS)

Arki Auliahadi

Dosen Sejarah Peradaban Islam

e-mail: arkiilpm@gmail.com

Diterima: 14 Maret 2017	Direvisi : 12 April 2017	Diterbitkan: 15 Juni 2017
-------------------------	--------------------------	---------------------------

Abstract

The explanation of this paper is about a discussion of the conflict between Muslim Patani and the Thai government. Since Patani became a Thai colony, Muslims were required to be noticed and obedient to the Thai rulers. Since Patani is integrated into the country of Thailand, Muslims face various challenges from the Thai government. Because of those unworthy treatment, the Patani Muslims are fighting against the Thai government. This resistance is intended to gain their rights as Malays and Muslims. The discussion of this paper aims to describe the socio-historic of Patani, describe the forms of struggle, describe the organization's struggles and the gait of that organization.

Keywords: *Muslim Patani, Thailand, Struggles*

Abstrak

Paparan tulisan ini merupakan sebuah pembahasan mengenai konflik yang terjadi antara Muslim Patani dengan pemerintah Thailand. Semenjak Patani menjadi jajahan Thai, umat Islam diharuskan tunduk dan patuh kepada kekuasaan Thai. Sejak Patani diintegrasikan ke dalam negara Thailand, umat Islam menghadapi berbagai tantangan dari pihak pemerintah Thai. Oleh karena mereka mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, maka umat Islam Patani melakukan perlawanan terhadap pemerintah Thai. Perlawanan ini bertujuan untuk memperoleh hak-hak mereka sebagai orang Melayu dan Islam. Pembahasan tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan sosio historis Patani, mendeskripsikan bentuk-bentuk perjuangan, mendeskripsikan organisasi-organisasi perjuangan serta kiprah organisasi itu.

Kata Kunci: Muslim Patani, Thailand, Perjuangan

A. Pendahuluan

Thailand merupakan sebuah negara dengan mayoritas pen-duduknya penganut agama Budha aliran *Theravada*, namun ada minoritas kecil pemeluk agama Islam.¹ Dari sekian banyak penganut agama Islam di sana, terdapat sebuah etnik Patani yang merupakan etnik Melayu yang sama dengan etnik Melayu di beberapa negara mayoritas Islam di Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia, dan Brunei. Meskipun dari segi politik mereka bagian dari negara Thailand,

tetapi dari segi bahasa dan budaya, mereka adalah Melayu, yang berbeda dengan etnik Siam (etnik mayoritas di Thailand).² Mereka pada umumnya berada di empat propinsi yaitu Patani, Satun, Yala dan Narathiwat.

Mengenai sejarah Patani, tidak terlepas dari persoalan Tanah Melayu. Pengertian Tanah Melayu adalah suatu semenanjung yang terbentang ke arah selatan dan kedudukannya di belahan tenggara benua Asia merupakan kawasan yang luas. Di utara

¹Indexmundi, *Thailand: Demographics Profile, 2012*, diakses dari: http://www.indexmundi.com/thailand/demographics_profile.html, pada pada 08-11-2012.

²Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, (Pekan Baru: Zanafa Publishing dan Nusa Media, 2011), h. 238.

mulai dari Segenting Kra hingga ujungnya serta pulau Singapura di bagian selatan.³

Dengan demikian, Tanah Melayu mempunyai dua bagian yaitu bagian utara yang dimulai dari Segenting Kra, Setul, Senggora (Songkhla), Yala, dan Bangnara. Sedangkan di bagian selatan, dimulai dari Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Melaka, Pulau Pinang, dan Singapura. Maka dalam hal ini, wilayah kerajaan Patani yang berada di utara merupakan bagian daripada Tanah Melayu.⁴

Sejarah Patani tidak terlepas dari sejarah awal kerajaan Melayu Patani yang masih diselimuti kekaburan. Dalam catatan sejarah tidak dapat dipastikan mengenai asal-usul atau *tarikb* yang sebenarnya kapan kerajaan Melayu Patani didirikan. Menurut catatan pelaut-pelaut China yang menjalin hubungan dengan negeri-negeri Asia Tenggara pada abad kedua Masehi, sebuah negeri yang bernama *Lang-ya-shiu* (Langkasuka) telah ada pada waktu itu. Berdasarkan catatan tersebut, ahli-ahli sejarah Eropa percaya bahwa negeri Langkasuka yang terletak di pantai timur Semenanjung Tanah Melayu antara Senggora (Songkhla) dan Kelantan adalah lokasi asal negeri Patani. Kerajaan tersebut beribu kota di sekitar daerah Yarang.

Teluk Langkasuka (Teluk Patani sekarang) merupakan sebuah pelabuhan yang sangat penting sejak kurun abad ke-8 M karena sangat sesuai untuk berlabuhnya kapal-kapal dagang dari berbagai wilayah sekitarnya. Menurut Paul Wheatly, kerajaan Langkasuka menguasai jalur perdagangan timur-barat melalui Segenting Kra dan kekuasaannya meliputi kawasan Semenanjung hingga ke Teluk Benggala. Kerajaan Langkasuka ada hingga menjelang

abad ketiga belas dan berganti menjadi Kerajaan Patani.⁵

Kedudukan Patani yang sangat strategik dari segi geografis, menyebabkan kota itu menjadi tujuan pedagang-pedagang asing baik dari barat maupun timur. Dalam waktu yang singkat, Patani telah muncul sebagai kerajaan yang penting, maju dari segi ekonomi, dan stabil dari segi politik dan pemerintahan.

Kapan tepatnya daerah Patani beralih memeluk agama Islam hingga kini belum diketahui dengan pasti. Menurut perkiraan d' Eredia (pada tahun 1613), sebagaimana yang dikutip oleh Surin Pitsuwan, Patani masuk Islam lebih dahulu dibandingkan Malaka, yang secara tradisional dikenal sebagai "Darussalam (tempat yang damai) pertama" waktu itu. Menurut G.W.J. Drewes dalam penelitiannya mengenai kedatangan Islam di Indonesia, ia menemukan bahwa di Trengganu, yang merupakan salah satu tetangga Patani, agama Islam sudah dianut secara mapan antara tahun 1386-1387.⁶

Hubungan awal Patani dengan Islam terjadi akibat hubungan perdagangan antara Arab, India dan China. Saudagar India dan Arab menduduki pusat-pusat perdagangan Patani pada akhir abad ke- 12 dan mereka menikahi penduduk setempat dan membentuk masyarakat Islam awal. Lebih dari tiga abad setelah itu Islam tersebar luas di kawasan tersebut hingga mempengaruhi golongan istana untuk memeluk Islam.⁷ Karena sejalan dengan tradisi *simbiosis* antara agama dan sistem pemerintahan kerajaan di Nusantara, serta kelaziman di kalangan pemegang kekuasaan untuk menerima "ideologi yang memberi legitimasi" sebelum rakyat sendiri memeluknya, maka Islam dianut oleh keluarga para raja.⁸

⁵Nik Anuar Nik Mahmud, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954*, (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2006), h. 15.

⁶Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, terjemah: Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 36-37.

⁷ W. K. Che. Man, dalam Farid Mat Zain dan Zulkarnain Mohamed (Eds), *loc. cit.*

⁸ Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*,

³Ibrahim Syukri, *Sejarah Kerajaan Melayu Patani*, (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2005), cet. 2, h.15. Lihat juga dalam Farid Mat Zain, *Islam di Tanah Melayu Abad Ke-19*, (Selangor: Kharisma Publications, 2007), h. 82.

⁴Nik Anuar Nik Mahmud, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954*, (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2006), h. 116.

Pemelukan agama Islam oleh golongan istana kerajaan Patani tidak jauh berbeda dengan proses yang terjadi dengan kerajaan-kerajaan Islam yang lain di Nusantara. Dalam hal ini, Raja Patani memeluk Islam disebabkan oleh faktor penyembuhan. Faktor ini merupakan salah satu alasan mudahnya proses Islamisasi di Nusantara. Menurut Azyumardi Azra, karena penyakit selalu dikaitkan dengan sebab-sebab spiritual, agama-agama baru tidak dapat berkembang kecuali jika mereka dipandang mempunyai jawaban terhadap penyakit.⁹ Dalam Hal ini, penyakit Raja Patani diobati oleh seorang ulama Muslim yang berasal dari Pasai yaitu Syeikh Sa'id atau Safiyy al-Din yang selanjutnya berhasil mengajak raja tersebut memeluk Islam.¹⁰

Di samping itu, raja mempunyai motif-motif ekonomi dan politik karena Islam adalah satu jalan untuk hubungan dagang dengan para pedagang Gujarat, Arab, Turki, dan Persia yang lebih awal berdagang pada abad ke- 14 M dan ke-15 M. Motif ekonomi merupakan salah satu alasan lain mudahnya Islam diterima. Dalam hal ini senada dengan pendapat Azyumardi Azra tentang asosiasi dengan kekayaan, bahwa penduduk Asia Tenggara melihat orang-orang Muslim sebagai saudagar kaya.¹¹ Selain itu, menurut Van Lur, sebagaimana yang dikutip oleh W.K.Che Man, beberapa orang pengawal pantai dan keluarga bangsawan menggunakan Islam sebagai politik untuk

mengokohkan kekuasaan mereka dan menghasilkan keteguhan raja-raja yang mempunyai kepentingan dalam mewujudkan kerajaan mereka sendiri karena mereka mengalami konflik dengan kerajaan Majapahit. Menurut Syed Husin al-Atas, sebagaimana yang dikutip oleh W.K.Che Man, Islam mempunyai identitas tersendiri dan oleh sebab itu dapat dijadikan untuk memenuhi sebagian cita-cita mendalam orang Islam. Oleh karena itu, pemeluk agama Islam oleh golongan istana Patani mungkin disebabkan oleh kehendak rakyat Patani terhadap nilai-nilai dan gaya hidup baru yang ditawarkan oleh kepercayaan yang baru itu.¹²

Kerajaan Melayu Patani mencapai puncak kejayaannya pada zaman pemerintahan raja-raja Perempuan atau para Ratu. Raja-raja perempuan itu adalah Raja Hijau (1584-1616), Raja Biru (1616-1624), Raja Ungu (1624-1635), dan Raja Kuning (1635-1651).¹³

Keagungan dan kekuatan Patani tidak kekal. Pada zaman akhir pemerintahan Raja Kuning (1651), Patani mulai menuju zaman kemerosotan. Keadaan Patani menjadi sunyi ketika Raja Kuning meninggalkan kerajaan tanpa seorang pengganti yang berwibawa. Dalam Hikayat Patani menyebutkan bahwa pertengkaran antara pembesar-pembesar negeri yang berebut kekuasaan untuk menjadi bendahara sehingga menyebabkan Raja Patani sebagai boneka saja.¹⁴

Ketika Patani sedang menghadapi kekacauan politik, Siam sedang berperang dengan Burma. Peperangan antara Burma dengan Siam secara tidak langsung telah melibatkan negeri-negeri Melayu utara, termasuk Patani yang menjadi rebutan kedua pihak yang berperang. Pada tahun 1779, Sultan Muhammad telah dipaksa memberi bantuan kepada Siam untuk menentang Burma. Apabila Sultan Muhammad enggan

terjemah: Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 36-37.

⁹Azyumardi Azra, *Renaissance Islam di Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), cet. 3, h. 64.

¹⁰W. K. Che. Man, "Islam Di Patani Semasa", dalam Farid Mat Zain, dkk (Eds), *Minoriti Muslim di Thailand*, (Selangor: L Minda Bandar Baru Bangi, 1998), h. 62. Cerita lengkap tentang pengobatan Raja Patani oleh Syeikh Safiyy al-Din terdapat dalam Hikayat Patani yang dimuat dalam buku Ibrahim Syukri, Ibrahim Syukri, *Sejarah Kerajaan Melayu Patani*, (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2005), cet. 2, h. 32-34.

¹¹Azyumardi Azra, *Renaissance Islam di Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), cet. 3, h. 63.

¹²W. K. Che. Man, dalam Farid Mat Zain, dkk (Eds), h.62

¹³Ahmad Fathy Al-Fatani, *Pengantar Sejarah Patani*, (Alor Setar: Pustaka Darussalam, 1994), h. 20.

¹⁴Ahmad Fathy Al-Fatani, *Pengantar Sejarah Patani*, (Alor Setar: Pustaka Darussalam, 1994), h. 20..

berbuat demikian, maka Phraya Chakri telah memerintah adiknya, Putera Surasi, dengan dibantu oleh Phraya Senaphutan, Gubernur Pattalung, Palatcana, dan Songkhla supaya menyerang Patani pada tahun 1785. Walaupun kerajaan Patani mencoba mempertahankan diri tetapi Siam telah berhasil menguasai Patani. Sultan Muhammad tewas dalam pertempuran melawan Siam. Akibat kekalahan tersebut, sebanyak empat ribu orang Melayu Patani menjadi tawanan dan dibawa ke Bangkok sebagai budak.¹⁵

Setelah kekalahan itu, Patani tunduk di bawah pemerintahan Siam. Wilayah tersebut kemudian berubah statusnya dari sebuah kerajaan yang berdiri sendiri menjadi kerajaan jajahan. Maka dimulailah era baru bagi Patani di bawah pemerintahan kerajaan Siam. Sebagai bentuk penyerahan Patani terhadap Siam, Sultan dan Sultanah diwajibkan mengirimkan “Bunga Emas”, yaitu bunga hiasan yang terbuat dari emas dan perak sebagai upeti dan tanda penghormatan kepada raja Siam, setiap dua setengah tahun sekali. Semua daerah yang takluk kepada Raja Siam harus melakukan ritual kenegaraan ini untuk menyatakan ketundukannya kepada Bangkok dan menegaskan loyalitasnya kepada Raja.¹⁶

Untuk mengatasi kemungkinan pemberontakan daerah Patani, maka kerajaan Siam membagi dan memecah-belah wilayah Patani menjadi tujuh buah negeri atau *Hua Muang* dan melantik tujuh orang penguasa negeri atau *Chao Muang*, dan dengan kebijakan ini maka berakhirlah kerajaan Patani Raya, dan sejak itu Patani hanya menjadi salah satu dari tujuh negeri.¹⁷

¹⁵Ahmad Fathy Al-Fatani, *Pengantar Sejarah Patani*, (Alor Setar: Pustaka Darussalam, 1994), h. 20.

¹⁶Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, terjemah: Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 25

¹⁷Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, terjemah: Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 36-37. Lihat juga Saifullah, *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 86-87

Tujuh negeri dan raja-rajanya

No	Negeri	Raja (Chao Muang)
1.	Patani	Tuang Sulung
2.	Teluba	Nik Dir
3.	Nongchik	Tuan Nik
4.	Jalor	Tuan Yalor
5.	Jambu	Nai Pai
6.	Rangae	Nik Dah
7.	Reman	Tuan Mansur

Pada tahun 1906, Pemerintahan Tujuh Wilayah Melayu disusun kembali menjadi satu *Monthon* (lingkaran) Patani. *Monthon* besar adalah Patani, Bangnara, Saiburi, dan Yala. Daerah Kedah juga dimasukkan ke dalam jajahan Siam dan dinamakan daerah Satun. Sedangkan Kelantan dan Trengganu berdasarkan perjanjian Siam-Inggris yang ditanda tangani pada 10 Maret 1909 diserahkan kepada Inggris di bawah Tanah Melayu Bersekutu.¹⁸

B. Latar Historis Perjuangan Muslim Patani

Semenjak wilayah Patani Raya dimasukkan secara resmi ke dalam kerajaan Thai pada tahun 1902¹⁹ telah menimbulkan penentangan umat Islam yang berbentuk politik dan agama.²⁰ Umat Islam Patani merasa dianiaya dan di bawah tekanan pembaharuan oleh mayoritas. Sangat tidak menyenangkan di wilayah tersebut dengan tidak adanya perhatian pemerintah terhadap

¹⁸ W. K. Che. Man, “Islam di Patani Semasa”, dalam Farid Mat Zain dan Zulkarnain Mohammed (Eds), *Minoriti Muslim di Thailand*, (Selangor: L Minda Bandar Baru Bangi, 1998), h. 7.

¹⁹Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, terjemah: Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 48. Lihat juga Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, (Pekan Baru: Zanafa Publishing dan Nusa Media, 2011), *op.cit.*, h. 240-241.

²⁰W. K. Che. Man, “Melayu Muslim Selatan Thai”, dalam Farid Mat Zain dan Zulkarnain Mohamed (Eds), *Muslim Selatan Thai: Konflik dan Perjuangan*, (Selangor: Karisma Publications Sdn. Bhd. Shah Alam, 2008), h. 7.

perasaan kebangsaan (Melayu) dan keagamaan mereka.²¹

Langkah pertama yang diambil oleh pemerintah Siam adalah integrasi administratif yang dirancang untuk memasukkan daerah-daerah Muslim itu ke dalam sistem politik nasional yang berpusat di Bangkok. Karena orang-orang Muslim tidak berpengalaman dengan sistem-sistem ini, maka perlu menempatkan mereka di bawah pejabat pemerintah Budhis Thailand.²²

Pada tahun 1923 di Belukar Semak, sebuah kampung yang terletak dekat daerah Rakak terjadi pemberontakan yang besar. Pemberontakan ini berpuncak akibat tindakan pemerintah Siam yang mengintegrasikan masyarakat Melayu yang dianggap minoritas ke dalam masyarakat Siam melalui proses pendidikan tersebut.²³

Sejak peristiwa Belukar Semak, akhirnya kerajaan Siam terpaksa memberi sedikit kelonggaran kepada Patani dan wilayah-wilayah sekitarnya dalam usaha menyatukan wilayah-wilayah tersebut ke dalam sistem pemerintahan Siam. Dengan demikian, Patani memperoleh sedikit otonomi.²⁴

Kelonggaran yang diberikan pemerintah Siam (Thai) memberikan sebuah hal yang positif kepada Muslim Patani untuk berjuang melalui parlemen. Semenjak terjadinya Revolusi Perlembagaan pada tahun 1932. Pada saat itu, sistem politik kerajaan Siam berganti dari kerajaan monarki

absolut menjadi kerajaan berparlemen. Sebagai langkah nyata melaksanakan sistem tersebut, pada tahun 1933 diadakan Pemilihan Umum pertama di seluruh wilayah dalam kerajaan Siam. Dalam Pemilihan Umum pertama, masyarakat Islam dalam tiga kawasan selatan (Patani, Yala, Narathiwat) tidak mengambil bagian dan tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Namun, masyarakat Islam di wilayah Satun berhasil memilih dan mengangkat calon Muslim sebagai wakil rakyat yaitu Tui bin Abdullah atau dikenal Phraya Samantarut Burin.²⁵ Hasil Pemilihan Umum tersebut mencerminkan sebuah fakta bahwa penduduk Satun pada umumnya mampu berbahasa Thai, dan kemampuan tersebut memudahkan mereka untuk berkomunikasi dan berpartisipasi dalam politik Thai.²⁶

Sebagai wakil tunggal rakyat Muslim, ia memainkan peran penting di parlemen Siam dalam memperjuangkan nasib masyarakat Islam, khususnya di wilayah selatan. Perjuangannya yang berhasil adalah mengecualikan masyarakat Islam dari kekuasaan undang-undang keluarga yang dibuat oleh parlemen pada 1 Oktober 1935. Sebagai gantinya, dibuat undang-undang khusus untuk masyarakat Islam yang dinamakan Undang-Undang Islam dalam hal keluarga dan pusaka.²⁷ Hasil positif tersebut, membuat pemimpin masyarakat Islam di tiga wilayah (Patani, Yala, dan Narathiwat) turut menarik perhatian dan minat mereka untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum berikutnya.²⁸

²¹M. Ali Ketani, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini*, terjemah: Zarkowi Soejoeti, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 203.

²²Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam : Melacak Akar-Akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), cet. I, h. 271.

²³Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam : Melacak Akar-Akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), cet. I, h. 271.

²⁴Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam : Melacak Akar-Akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), cet. I, h. 53.

²⁵Ahmad Omar Chapakia, "Pembaharuan Politik Selatan Thai dan Perjuangan Masyarakat Islam", dalam Farid Mat Zain dan Zulkarnain Mohammed (Eds), *Minoriti Muslim di Thailand*, (Selangor: L Minda Bandar Baru Bangi, 1998), h. 221.

²⁶Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, terjemah: Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 59.

²⁷Menurut penulis, undang-undang tersebut tidak jauh berbeda dengan hukum perdata Islam yang mengatur tentang keluarga dan harta warisan yang ada di Indonesia.

²⁸Ahmad Omar Chapakia, "Pembaharuan Politik Selatan Thai dan Perjuangan Masyarakat Islam", dalam Farid Mat Zain dan Zulkarnain Mohammed (Eds), *Minoriti Muslim di Thailand*,

Pada Pemilihan Umum kedua tahun 1937, para pemimpin masyarakat Islam (bangsawan dan keturunan Raja Melayu) ikut serta sebagai calon dalam Pemilihan Umum tersebut. Hasil Pemilihan Umum tersebut, calon-calon Muslim menang sepenuhnya di tiga wilayah. Mereka berhasil mengukuhkan kedudukan sebagai wakil rakyat dalam Pemilihan Umum tersebut.²⁹

Akan tetapi hal ini tidak berlangsung lama. Semenjak pemerintahan kerajaan Siam di bawah Panglima Tentara Phibul Songgram, rasa nasionalisme Siam dibangkitkan. Pibul memulai rencananya dengan mengumumkan Tujuh Dikri atau perintah yang bersifat perundang-undangan pada tahun 1939.³⁰ Ketujuh Dikri itu adalah mengenai cara untuk menanamkan semangat cinta negara di kalangan rakyat negara itu. Sejalan dengan hal tersebut, akhirnya nama Siam diganti dengan Muang Thai (Thailand), yang berarti *Negara Bangsa Merdeka*.³¹ Kemudian Pibul Songgram mengambil langkah tegas terhadap asimilasi kebudayaan golongan minoritas dengan menjalankan program Dasar Kebudayaan Paksaan (*Rathaniyom*)³² pada tahun 1939.³³ Dalam hal ini semua kebudayaan masyarakat minoritas

harus ditukar dan diubah sesuai dengan kebudayaan Thai. Dengan kata lain, semua orang di Muang Thai harus menjadi bangsa Thai.³⁴

Keadaan ini telah menimbulkan perasaan kurang senang di kalangan penduduk-penduduk di negara tersebut. Sesuai dengan semangat yang berkembang ketika itu, Kerajaan Thai juga berusaha untuk mengawal kehidupan keagamaan penduduk negara itu. Tujuannya adalah untuk menyamakan semangat terhadap negara dengan Budhisme. Ini merupakan langkah yang membuat sakit hati di kalangan orang-orang Melayu. Akibatnya, orang Islam Patani dilarang memakai nama Melayu, berpakaian Melayu, berbicara dan menulis dalam bahasa Melayu serta mempelajari agama Islam. Selain itu, undang-undang Islampun dihapuskan. Akhirnya, hal tersebut menyulut kemarahan umat Islam.³⁵ Puncaknya pada tahun 1944, *Jawatan Kadhi* dihapuskan, dan masalah yang berkaitan dengan perkawinan dan harta pusaka diurus berdasarkan undang-undang sipil, bukan syariat.³⁶

C. Bentuk-Bentuk Perjuangan Muslim Patani

Akibat berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Thai terhadap umat Islam Patani, akhirnya mereka menentang kebijakan-kebijakan tersebut. Hal ini dilandasi oleh perjuangan kemerdekaan oleh bangsa lain di Asia Tenggara. Adapun bentuk-bentuk perjuangan Muslim Patani, antara lain:

1. Perjuangan Menuntut Otonomi oleh Haji Sulong dan Gerakan Rakyat Patani (GRP) Tahun 1947-1948

Para ulama yang baru saja pulang dari Mekkah tidak dapat memberikan pimpinan

(Selangor: L Minda Bandar Baru Bangi, 1998), 221.

²⁹Farid Mat Zain dan Zulkarnain Mohammed (Eds), *Minoriti Muslim di Thailand*, (Selangor: L Minda Bandar Baru Bangi, 1998), h. 222.

³⁰Nik Anuar Nik Mahmud, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954*, (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2006), h. 56.

³¹Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, terjemah: Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 69. Lihat juga Soebantardjo, *Sari Sedjarah Djilid I : Asia-Australia*, (Yogyakarta: Bopkri, 1960), h. 104.

³²Program *Rathaniyom* merupakan sebuah kebijakan yang sangat rasialis. Hal ini berarti negeri Thai untuk ras Thai.

³³W. K. Che. Man, "Melayu Muslim Selatan Thai", dalam Farid Mat Zain dan Zulkarnain Mohammed (Eds), *Minoriti Muslim di Thailand*, (Selangor: L Minda Bandar Baru Bangi, 1998), h. 9, lihat juga Nik Anuar Nik Mahmud, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954*, (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2006), h. 53, lihat juga Paulus Rudolf Yuniarto, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, vol. 7, no. 1, (2005), h. 102.

³⁴ *Sari Sedjarah Djilid I : Asia-Australia*, (Yogyakarta: Bopkri, 1960), h. 104.

³⁵Nik Anuar Nik Mahmud, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954*, (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2006), h. 57.

³⁶Saifullah, *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 91.

yang efektif, karena mereka belum berpengalaman dalam berurusan dengan penguasa-penguasa Thai. Lunturnya kekuatan politik dan hilangnya peran elit tradisonal mereka menimbulkan efek melemahkan umat.³⁷

Orang-orang Islam Patani akhirnya menemukan pemimpin yang ideal itu dalam diri Haji Sulong bin Abdul Kadir bin Muhammad al-Fatani, yang lebih dikenal dengan nama Haji Sulong.³⁸ Haji Sulong kembali ke Patani pada tahun 1924 dan memulai karirnya sebagai guru agama di wilayah itu. Ia telah mendirikan Madrasah al-Mu'aruf al-Wataniah. Akan tetapi madrasah tersebut tidak dapat bertahan lama setelah pemerintah Siam memerintahkan untuk menutup madrasah tersebut. Dengan penutupan madrasah tersebut, Haji Sulong mulai mengajar di masjid Patani dalam bidang ilmu Ushuludin dan Tafsir.

Menyadari bahwa identitas agama dan kebudayaan orang Islam Patani telah tertantang di rezim Pibul Songgram, pemimpin-pemimpin agama Islam di bawah pimpinan Haji Sulong telah mendirikan sebuah lembaga agama yang dikenal sebagai *He'et al-Napadh al-Labkanal Shariat* (Lembaga Untuk Mempertahankan Undang-Undang Syari'at).³⁹ Haji Sulong tergolong ulama yang mencurigai keterlibatan pemerintah dalam urusan agama komunitas di Thailand.⁴⁰ Ia juga dikatakan sebagai salah seorang yang menentang campur tangan kerajaan Thai dalam urusan agama Islam.⁴¹

Dengan mengikuti rumusan Muhammad Abduh mengenai suatu hubungan yang jelas antara kemanusiaan,

keberagaman, keadilan, bersama-sama dengan manifestasi-manifestasinya di kalangan umat Islam, maka menjelang Juni 1946, Haji Sulong memperoleh keyakinan bahwa komunitas seperti itu tidak dapat ditegakkan selama Patani Raya masih berada dalam kekuasaan Thai.

Haji Sulong yang diilhami oleh pandangan Pridi yang menganjurkan suatu *federalisme*, otonomi kebudayaan untuk golongan-golongan etnis dalam lingkungan Thai, desentralisasi kekuasaan, dan dari segi moral menentang kesewenang-wenangan kaum *fasis* dan *militeris* dalam memperlakukan golongan-golongan minoritas. Sebagai kepala pemerintah, Pridi telah membentuk sebuah panitia pada tingkat kabinet untuk mencari jalan guna memperbaiki situasi yang semakin memburuk di selatan Thai. Ia juga memulihkan "otonomi hukum" kepada golongan Islam Patani pada tahun 1946.

Tidak lama setelah itu, Pridi dijatuhkan dari jabatannya oleh orang-orang yang duduk dalam parlemen dan yang aktif dalam politik ditangkap oleh polisi dengan dalih bahwa orang-orang itu sedang berkomplot untuk menghasut suatu gerakan separatis di wilayah selatan Thai dengan bantuan orang-orang yang bersimpati di Kelantan. Setelah kepergian Pridi, Haji Sulong tidak dapat menghentikan momentum perjuangan otonomi politik yang sudah berjalan.⁴²

Oleh karena hal tersebut, Haji Sulong membentuk Gerakan Rakyat Patani (GRP).⁴³ Haji Sulong berhasil menggali dukungan dari kaum ulama dan politisi Melayu Muslim, yang telah dikecewakan oleh sistem parlementer yang tidak menghasilkan sesuatu perbaikan di daerah mereka.⁴⁴

³⁷ Ajid Thohir (2), *op. cit.*, h. 357.

³⁸ Mengenai biografi lengkap Haji Sulong, terdapat dalam Ahmad Fathy Al-Fatani, *Ulama Besar Dari Patani*, (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2002).

³⁹ Ahmad Fathy Al-Fatani, *Ulama Besar Dari Patani*, (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2002), h. 57.

⁴⁰ Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, terjemah: Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 115.

⁴¹ Nik Nik Anuar Nik Mahmud, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954*, (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2006), h. 58.

⁴² Nik Anuar Nik Mahmud, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954*, (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2006), 116-117.

⁴³ W.K. Che Man, "Perjuangan Pembebasan Bangsa Melayu Islam Patani Menjelang Tahun 2000", dalam Wan Kamal Mujani (Ed), *Minoriti Muslim Cabaran dan Harapan Menjelang Abad Ke 21*, (Bangi: Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah dan Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Univerisi Kebangsaan Malaysia, 2002), h. 38.

⁴⁴ W.K. Che Man, "Perjuangan Pembebasan Bangsa Melayu Islam Patani Menjelang Tahun 2000", dalam Wan Kamal Mujani (Ed), *Minoriti*

Akhirnya, pada 1 April 1947, sebuah pertemuan antara pemimpin-pemimpin masyarakat Islam di wilayah selatan diadakan di Patani. Keputusannya satu kata sepakat dicapai untuk menyerahkan sebuah momerandum yang mengandung beberapa tuntutan dari masyarakat Islam di selatan kepada wakil-wakil kerajaan Thai ketika mereka datang membuat tinjauan ke Patani (tinjauan ini dilakukan oleh anggota-anggota *Suruban Jaya* yang dibentuk oleh Pridi dalam usahanya menangani masalah orang Islam di selatan Thai).⁴⁵

Pada tanggal 3 April 1947, GRP di bawah pimpinan Haji Sulong menyampaikan kepada pemerintah Thai sebuah Rencana Tujuh Pasal untuk pembentukan sebuah daerah otonom.⁴⁶ Inilah momerandum yang kemudian dikenal dengan nama "Tujuh Tuntuan Haji Sulong" kepada kerajaan Thai.⁴⁷ Pasal-pasal itu adalah:

- a) Diangkat seorang Komisaris tinggi untuk memerintah Patani Raya yang berasal dari putra daerah dan dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya yang bebas, dengan hak otonomi yang luas.
- b) Delapan puluh persen pejabat pemerintah di keempat propinsi ini Patani hendaklah Melayu Muslim, sehingga mencerminkan rasio penduduk.
- c) Bahasa Melayu dan bahasa Siam menjadi bahasa resmi.
- d) Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah dasar.
- e) Hukum Syari'ah diberlakukan di daerah ini, dengan pengadilan yang

terpisah dan bebas dari sistem peradilan pemerintah.

- f) Semua hasil pajak di daerah ini akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat daerah ini.
- g) Majelis Ulama Islam propinsi akan diberi wewenang penuh dalam menjalankan hukum Syariah dan kebudayaan.⁴⁸

Berdasarkan isi momerandum tersebut, terlihat bahwa Haji Sulong tidak mengusulkan pembentukan sebuah negara yang merdeka, tetapi hanya sebuah daerah yang otonom untuk mempertahankan kebudayaan dan identitas serta sifat-sifatnya yang khas.⁴⁹

Akan tetapi, harapan-harapan ini segera buyar dan sirna.⁵⁰ Karena pada bulan November 1947, ketika militer mengambil alih negara yang menyebabkan Phibul kembali ke kekuasaannya, golongan Melayu merasa takut bahwa kembangannya Phibul akan berarti penindasan yang sama terhadap mereka.⁵¹ Akibatnya, Haji Sulong dan para pendukungnya melakukan tekanan yang lebih besar dengan jalan akan memboikot pemilihan umum yang akan direncanakan untuk akhir Januari 1948.⁵² Pemberontakan tersebut menjadi lambang semangat perlawanan Melayu dan masih terus mengilhami gerakan-gerakan kemerdekaan hingga kini.⁵³

⁴⁸Saifullah, *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 91-92.

⁴⁹Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, terjemah: Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 118.

⁵⁰Ahmad Fathy al-Fatani, *Pengantar Sejarah Patani*, (Alor Setar: Pustaka Darussalam, 1994), h. 92.

⁵¹Uthai Dulyakasem, "Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme Etnis: Kasus Muslim di Siam Selatan", dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (Eds), *op. cit.*, h. 260.

⁵²Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, terjemah: Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 123-124.

⁵³Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, terjemah: Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 125.

Muslim Cabaran dan Harapan Menjelang Abad Ke 21, (Bangi: Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah dan Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Univerisi Kebangsaan Malaysia, 2002), h. 121.

⁴⁵Ahmad Fathy al-Fatani, *Pengantar Sejarah Patani*, (Alor Setar: Pustaka Darussalam, 1994), h. 89-91.

⁴⁶Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, terjemah: Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 117.

⁴⁷Ahmad Fathy al-Fatani, *Pengantar Sejarah Patani*, (Alor Setar: Pustaka Darussalam, 1994), h. 89-91.

Sementara itu, pemerintah tetap menahan Haji Sulong karena ia menolak memberikan uang jaminan. Pada tahap selanjutnya, ketegangan semakin meningkat di empat wilayah selatan Thai setelah penangkapan Haji Sulong.⁵⁴

2. Perjuangan Separatis Melalui Organisasi Pasca GRP

Terdapat beberapa organisasi besar Muslim di Thailand Selatan setelah GRP pimpinan Haji Sulong. Semua organisasi ini berjuang untuk pembebasan Patani dari pemerintahan Thai. Dalam istilah lain disebut "perjuangan pemisahan"⁵⁵ atau "gerakan separatis". Organisasi-organisasi itu antara lain:

- a) Gabungan Melayu Patani Raya (GAMPAR)

Kelompok-kelompok penungsi Melayu, mengadakan pertemuan dengan kerjasama Partai Kebangsaan Melayu (PKM) cabang Kelantan, perwakilan orang-orang Melayu di selatan Thai bertempat di Kota Bharu, Kelantan, awal Februari 1948, untuk membicarakan masalah orang-orang Melayu Patani. Dalam pertemuan yang dihadiri sebanyak 500 orang peserta disepakati untuk mendirikan sebuah organisasi persatuan orang-orang Melayu

⁵⁴Menurut hemat penulis di sinilah kekeliruan Menteri Dalam Negeri, seharusnya untuk meredam ketegangan itu ia tidak melakukan kebohongan publik dengan mengatakan hanya beberapa kekacauan kecil yang terjadi, seharusnya ia merumuskan beberapa akomodasi yang dapat mempertemukan antara kebijakan pemerintah dengan hal-hal yang menenangkan masyarakat Muslim Patani, yakni melakukan kunjungan ke wilayah Thailand Selatan dan memberikan kepastian serta jaminan kepada masyarakat Patani bahwa masalah di wilayah tersebut akan segera diselesaikan dalam waktu singkat. Dengan melakukan hal tersebut, akan memberikan dampak berupa berkurangnya aksi-aksi kekerasan di wilayah tersebut.

⁵⁵Ahmad Fathy al-Fatani, *Pengantar Sejarah Patani*, (Alor Setar: Pustaka Darussalam, 1994), h. 125.

Patani,⁵⁶ yang dinamai "Gabungan Melayu Patani Raya" atau GAMPAR (dalam abjad Jawi dibaca : ga, mim, pa, ra) pada tanggal 5 Maret 1948 (bertepatan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1367 H), tidak lama setelah Haji Sulong ditangkap.⁵⁷

Sejak berdirinya GAMPAR, beberapa aktivitas diusahakan dengan kerjasama Partai Kebangsaan Melayu di Tanah Semenanjung Melayu untuk menyebarkan pemberitaan mengenai Patani. Hasil dari kegiatan GAMPAR ini, isu Patani mulai mendapat perhatian surat kabar dan organisasi-organisasi politik di Semenanjung Tanah Melayu dan Singapura.⁵⁸

Walaupun GAMPAR berhasil menarik perhatian masyarakat internasional terhadap masalah yang dihadapi orang Melayu di Thailand Selatan, tetapi gagal mempengaruhi beberapa negara Asia dan negara-negara Arab untuk membawa isu Patani ke Majelis Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁵⁹

GAMPAR terpaksa dibubarkan lebih awal. Hal ini terjadi ketika Tengku Mahmud Mahyidden⁶⁰

⁵⁶Nik Anuar Nik Mahmud, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954*, (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2006), h. 81.

⁵⁷Ahmad Fathy al-Fatani, *Pengantar Sejarah Patani*, (Alor Setar: Pustaka Darussalam, 1994), h. 101. Dari beberapa sumber menyatakan bahwa organisasi itu disingkat dengan GEMPAR, tapi dalam sumber yang lain disingkat dengan GAMPAR. Dalam hal ini penulis lebih cenderung untuk menggunakan singkatan GAMPAR karena singkatan ini lebih cocok apabila dibaca dengan tulisan Jawi.

⁵⁸Nik Anuar Nik Mahmud, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954*, (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2006), h. 81-82.

⁵⁹Nik Anuar Nik Mahmud, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954*, (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2006), h. 81-82.

⁶⁰Tengku Mahmud Mahyidden merupakan putera kedua Raja Patani yang terakhir. Setelah ayahnya meninggal di Kota Bharu, Kelantan, tahun 1933, ia menjadi Pegawai Pemerintah Melayu di Kelantan dan bertugas sebagai *Superintendent Education Officer* (Petugas Pengawas Pendidikan). Namanya mulai dikaitkan dengan perjuangan Patani tahun 1942 ketika ia menjadi anggota tentara

diperingatkan oleh seorang Pegawai Tinggi Inggris agar tidak mencampuri permasalahan Patani atas alasan kerjasama Thai dan Inggris dalam memberantas kaum komunis di perbatasan wilayah Patani. Lebih dari itu, perintah Inggris agar GAMPAR dibubarkan dan orang-orang Patani yang berada di Kota Bharu ditempatkan di sebuah penempatan khusus di Pasir Puteh dan Besut, di samping itu kegiatan pemimpin-pemimpin mereka diawasi.⁶¹

b) Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP)

Setelah GAMPAR dibubarkan, kemudian orang-orang mantan anggota organisasi itu membentuk organisasi Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP). Organisasi ini didirikan oleh Tengku Mahmood Mahyiddeen, putera Raja Patani yang terakhir. Ketika Mahyiddeen meninggal pada tahun 1953, Adul Na Siburi mengambil alih pimpinan BNPP.⁶² Tujuan organisasi ini adalah untuk memulihkan kedudukan lama Patani di bawah kesultanan Melayu dengan status sebagai "negeri otonomi" dalam Persekutuan Malaysia.⁶³

BNPP dianggap berjasa memperkenalkan masalah kaum

Muslim kepada dunia Arab. Melalui jaringan-jaringannya di Timur Tengah, organisasi-organisasi ini berhasil mengirimkan pelajar-pelajar Patani ke banyak universitas. Organisasi ini dikabarkan telah mendirikan sebuah kantor pusat di kota Mekkah untuk mengkoordinasikan kegiatannya. Setiap tahun, bertepatan dengan musim haji, diadakan pertemuan untuk membahas dan mengevaluasi strategi perjuangan BNPP. Pemerintah Bangkok merasa cemas dengan kenyataan bahwa organisasi itu dapat mengutus wakil-wakilnya ke berbagai pertemuan Islam.⁶⁴

c) Barisan Revolusi Nasional (BRN)

Organisasi ini nama lainnya adalah *Liberation Front of Republic Patani* (LFRP). Organisasi ini didirikan pada 13 Maret 1960 oleh Haji Karim bin Hasan. Tujuan utama BRN adalah untuk menyatukan kembali kumpulan pejuang yang ada ke dalam sebuah organisasi tunggal untuk memperjuangkan Patani.⁶⁵ Seperti yang terlihat dari namanya, organisasi ini juga bertujuan "republik", dan cenderung ke arah suatu bentuk sosialisme Islam. Menurut sumber-sumber pemerintah Thai, basis organisasi ini berada di kota dan memiliki pasukan gerilya yang baik

Inggris yang berpangkalan di India. Dengan menjadi anggota tentara Inggris dan bekerjasama dengan gerakan nasionalis Melayu, ia berharap ketika Perang Dunia berakhir, Inggris akan membantunya mendapatkan Patani. Penjelasan lebih lengkap tentang biografi dan perjuangan Tengku Mahmood Mahyiddeen, lihat Mohd. Zamberi A. Malek, *Harimau Malaya: Biografi Tengku Mahmood Mahyiddeen*, (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2009).

⁶¹Ahmad Fathy al-Fatani, *Pengantar Sejarah Patani*, (Alor Setar: Pustaka Darussalam, 1994), h. 106.

⁶²Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, terjemah: Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 175.

⁶³Ahmad Fathy al-Fatani, *Pengantar Sejarah Patani*, (Alor Setar: Pustaka Darussalam, 1994), h. 130.

⁶⁴Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, terjemah: Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 175.

⁶⁵Ahmad Fathy al-Fatani, *Pengantar Sejarah Patani*, (Alor Setar: Pustaka Darussalam, 1994), h. 127. Menurut W. K. Che Man, "Perjuangan Pembebasan Bangsa Melayu Islam Patani Menjelang Tahun 2000", dalam Wan Kamal Mujani (Ed), h. 39, dinyatakan bahwa BNPP berubah nama menjadi Barisan Islam Pembebasan Patani (BIPP) pada tahun 1959 oleh Tengku Abdul Jalil bin Tengku Abdul Muthalib. Perubahan nama organisasi BNPP menjadi BIPP karena orientasi organisasi tersebut cenderung kepada Islam. Perubahan nama tersebut merupakan hasil persetujuan yang dicapai dalam satu musyawarah besar tahunannya. Sejak perubahan nama menjadi BIPP, organisasi ini dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil bin Tengku Abdul Muthalib.

perlengkapannya. Kebanyakan pemimpin organisasi ini berpendidikan luar negeri, khususnya di Malaysia dan Indonesia.⁶⁶

d) Patani United Liberation Organization (PULO)

Organisasi ini dalam bahasa Melayu bernama Pertubuhan Persatuan Pembebasan Patani (PPPP) atau dalam bahasa Inggris *Patani United Liberation Organization* (PULO).⁶⁷ Didirikan di India pada tanggal 22 Januari 1968⁶⁸ oleh Tengku Bira Kotanila (Kabir Abdul Rahman) seorang mahasiswa tamatan Alighar University bersama-sama dengan kumpulan pelajar Patani yang lain dari universitas yang sama.⁶⁹ Organisasi ini

merupakan organisasi induk yang mengkoordinasikan banyak kelompok gerilya yang menentang pemerintah Thai. PULO dianggap lebih praktis dan dengan segera meluaskan imbauannya kepada semua unsur dalam masyarakat Melayu Muslim.

Salah satu hal yang menyebabkan PULO efektif dan mendapat dukungan luas adalah jaringannya yang luas di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan pimpinan PULO terdiri dari para cendekiawan muda lulusan perguruan tinggi di Timur Tengah dan Asia Selatan, sehingga mereka berhasil mendapatkan dukungan dari dalam dan luar negeri.⁷⁰

e) Barisan Bersatu Mujahidin Patani (BBMP)

Pada tahun 1985, Wahyudin Muhammad, mantan wakil pengurus BIPP dan beberapa orang pimpinan lainnya membentuk Barisan Bersatu Mujahidin Patani (BBMP) dalam usaha membekali organisasi yang memayungi perjuangan separatis di Patani.⁷¹

⁶⁶ Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, terjemah: Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 177-178.

⁶⁷ Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, terjemah: Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 179.

⁶⁸ Ada dua pendapat W. K. Che Man tentang tahun berdirinya PULO. Pertama, menurut W.K. Che Man, "Melayu Muslim Selatan Thailand", dalam Farid Mat Zain, dkk (Eds), *Minoriti Muslim di Thailand* (Selangor: L Minda Bandar Baru Bangi, 1998), h. 25, dinyatakan bahwa organisasi PULO didirikan pada bulan Januari 1967. Kedua, W. K. Che Man, "W.K. Che Man, "Perjuangan Pembebasan Bangsa Melayu Islam Patani", dalam Wan Kamal Mujani (Ed), *op. cit.*, h. 39, menyatakan tahun 1968. Menurut penulis, organisasi PULO didirikan pada bulan Januari 1968, karena banyak sumber yang menyebutkan berdirinya organisasi itu tahun 1968. Sumber-sumber tersebut, yaitu Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, terjemah: Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES, 1989), h.179, Ahmad Fathy al-Fatani, *Pengantar Sejarah Patani*, (Alor Setar: Pustaka Darussalam, 1994), h. 128. Dari kedua pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa tahun 1967 merupakan tahun di mana Tengku Bira Kotanila merencanakan untuk mendirikan sebuah organisasi perjuangan umat Islam Patani, dan hal tersebut baru terealisasi pada tahun 1968.

⁶⁹ Ahmad Fathy al-Fatani, *Pengantar Sejarah Patani*, (Alor Setar: Pustaka Darussalam, 1994), h. 128 dan W. K. Che. Man, "Islam Agama dan Politik di Patani", dalam Farid Mat Zain dan

Zulkarnain Mohamed (Eds), *Muslim Selatan Thai: Konflik dan Perjuangan*, (Selangor: Karisma Publications Sdn. Bhd. Shah Alam, 2008), h. 77.

⁷⁰ Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, terjemah: Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 180-181.

⁷¹ W. K. Che. Man, "Institusi Agama dan Politik di Patani", dalam Farid Mat Zain dan Zulkarnain Mohamed (Eds), *Muslim Selatan Thai: Konflik dan Perjuangan*, (Selangor: Karisma Publications Sdn. Bhd. Shah Alam, 2008), h. 77. Lihat juga W. K. Che. Man, "Islam Di Patani Semasa", dalam Farid Mat Zain, dkk (Eds), h. 76. Pendapat lain dari W. K. Che Man, "Perjuangan Pembebasan Bangsa Melayu Patani", dalam Wan Kamal Mujani (Ed), h. 39 dinyatakan bahwa organisasi yang didirikan oleh Wahyudin Muhammad bernama Gerakan Mujahidin Patani (GMP) pada tahun 1989. Penulis berpendapat bahwa organisasi yang didirikan oleh Wahyudin Muhammad pada awalnya bernama Barisan Bersatu Mujahidin Patani (BBMP) pada tahun 1985. Bila dibandingkan dengan kedua tahun yang berbeda, maka tahun 1985 lebih dahulu dibandingkan tahun 1989. Dapat disimpulkan bahwa tahun 1989 merupakan perubahan nama dan peresmian organisasi BBMP menjadi GMP.

Walaupun organisasi ini berbeda dalam banyak hal, tetapi mereka memandang pemerintahan Siam terhadap Patani merupakan suatu kekuasaan yang tidak berubah. Pada masa aktivitas organisasi ini meningkat, istilah "kerajaan ghaib" digunakan oleh beberapa penduduk kampung yang beragama Islam untuk mengacu kepada organisasi ini.⁷²

Organisasi tersebut meningkatkan tahap pengaruhnya di berbagai kawasan yang beragama Islam. Penduduk kampung beragama Islam yang tinggal dalam kawasan ini secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam aktivitas organisasi ini. Walaupun tidak semua penduduk Islam dipengaruhi oleh organisasi ini tetapi kebanyakan mereka mengetahui politik pembebasan.

3. Perjuangan di Bawah Naungan BERSATU

Organisasi-organisasi yang berjuang untuk pembebasan Patani berangsur-angsur mengalami ke-munduran. Hal ini disebabkan sumber keuangan yang tidak mencukupi. Sebagian besar sumber keuangan datang dari sumbangan anggota dan usaha yang dilakukan oleh setiap pasukan sendiri. Dengan demikian, setiap anggota pasukan mempunyai dua tugas utama yaitu berusaha mendapatkan dana yang cukup dan merancang aktivitas perjuangan yang berbekas. Tugas berat ini tidak saja menghambat dan melemahkan perjuangan, bahkan menyebabkan terjadinya persaingan dan perselisihan antara pasukan yang ada.⁷³

⁷²W. K. Che. Man, "Institusi Agama dan Politik di Patani", dalam Farid Mat Zain dan Zulkarnain Mohamed (Eds), *Muslim Selatan Thai: Konflik dan Perjuangan*, (Selangor: Karisma Publications Sdn. Bhd. Shah Alam, 2008), h. 77.

⁷³W.K. Che Man, "Perjuangan Pembebasan Melayu Islam Patani Menjelang Abad Ke 21", dalam Farid Mat Zain dan Zulkarnain Mohamed (Eds), *Muslim Selatan Thai: Konflik Dan Perjuangan*, (Selangor: Karisma Publications Sdn. Bhd. Shah Alam, 2008), h. 181. Lihat juga W. K. Che Man, "Perjuangan Pembebasan Melayu Islam Patani Menjelang Abad Ke 21", dalam Wan Kamal Mujani (Ed), *Minoriti Muslim Cabaran dan*

Para pemimpin perjuangan dan organisasi-organisasi yang simpati dengan gerakan-gerakan separatis telah beberapa kali berusaha mencari persatuan dan kerjasama dalam menentang pihak lawan, akan tetapi mengalami kegagalan. Hal ini karena setiap organisasi perjuangan percaya bahwa organisasinya mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. Pada akhir 1980-an, hampir semua organisasi pembebasan Patani mulai menyadari bahwa kelemahan aktivitas perjuangan mereka sulit diatasi. Tanpa mengambil tindak lanjut, perjuangan mereka pasti menemui jalan buntu.

Pada tanggal 31 Agustus 1989, persidangan pejuang-pejuang Patani diusulkan dan dilaksanakan bersama oleh para pejuang pembebasan, akademisi, dan para pegawai. Empat buah organisasi gerakan pembebasan yang utama telah mengahdirinya, yaitu BIPP, BRN-Kongres, PULO dan GMP. Hasil dari keputusan persidangan, mereka berikrar untuk bersama dan setuju membentuk sebuah organisasi yang memayungi perjuangan rakyat Patani. Pada pertengahan 1991, organisasi payung yang telah disetujui ini dibentuk dan diberi nama Barisan Bersatu Kemerdekaan Patani (BERSATU) atau *United Fronts for Patani Independence*. Wahyudin Muhammad, pengurus GMP dipilih sebagai presiden pertama BERSATU. Sebagai organisasi payung pertama dalam sejarah perjuangan pembebasan Patani, BERSATU mulai giat dan mulai menarik simpati dan keyakinan rakyat Patani terhadap perjuangan pembebasan. Unit-unit gerilya kembali aktif walaupun belum meningkat ke tahap yang pernah dicapai seperti pada tahun 70-an.⁷⁴

Persidangan pemimpin-pemimpin pejuang Patani diadakan pada 4-5 Juli 1995.

Harapan Menjelang Abad Ke 21, (Bangi: Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah dan Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Univerisi Kebangsaan Malaysia, 2002), h. 40-47.

⁷⁴Wan Kamal Mujani (Ed), *Minoriti Muslim Cabaran dan Harapan Menjelang Abad Ke 21*, (Bangi: Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah dan Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Univerisi Kebangsaan Malaysia, 2002), h. 40-47.

Hasil dari persidangan yang berlangsung selama dua hari menghasilkan dibentuknya Komite Perundingan Rakyat Melayu Patani (KPRMP). KPRMP beranggotakan tujuh barisan pembebasan, empat barisan merupakan komponen BERSATU (BIPP, BRN-Kongres, GMP dan PULO) dan tiga barisan bukan anggota BERSATU yaitu BRN, Gerakan Ulama Patani (GUP) dan Patani United Liberation Organization 88 (PULO 88). Dr. Mahdi Daud terpilih menjadi Presiden BERSATU pada bulan Agustus 1994 dan sekaligus dilantik sebagai ketua KPRMP.⁷⁵

Dari aspek perkembangan organisasi, BERSATU dan KPRMP memperluas persatuan perjuangan dengan mendirikan Majelis Permusyawaratan Rakyat Melayu Patani (MPRMP) dan Perlembagaan Negara Melayu Islam Patani (PNMIP) pada 14-15 Juni 1997. Majelis ini beranggotakan wakil-wakil yang berpengalaman dan mereka yang berpendidikan tinggi (kurang lebih ada enam orang anggota berijazah Doktor Falsafah dan tiga orang lulusan S3 ilmu medis). Dengan kata lain, MPRMP adalah parlemen dan kerajaan perjuangan pembebasan Patani yang diperkirakan meneruskan perjuangan hingga tahun 2000 dan seterusnya.⁷⁶

4. Perjuangan Melalui Parlemen

Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa perjuangan melalui parlemen telah cukup lama dilakukan sebelum perjuangan separatis. Hasil dari perjuangan parlemen yaitu adanya wakil-wakil masyarakat Islam dalam parlemen. Namun situasi politik Thailand periode itu dikuasai oleh golongan tentara. Jendral Phibun Songkram yang menjabat Perdana Menteri melaksanakan

program *Rathaniyom*, yang memaksa semua penduduk mengikuti budaya yang ditetapkan oleh negara. Hal ini mendapatkan perlawanan dari wakil-wakil Muslim. Namun perlawanan tersebut dijawab dengan tindakan kekerasan oleh pihak pemerintah. Akibatnya, masyarakat Islam di tiga wilayah (Patani, Yala, Narathiwat) tidak berpartisipasi lagi dalam politik Pemilihan Umum pada tahun 1943 dan 1946.⁷⁷ Pada tahun-tahun tersebut, para wakil rakyat di tiga wilayah Muslim dipegang oleh orang Budha. Hal ini terus berlanjut hingga Pemilihan Umum antara tahun 1950-an dan 1960-an.⁷⁸

Pada awal tahun 1970-an, situasi politik Thailand mulai mengalami perubahan besar akibat demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa di Bangkok untuk menuntut perubahan terhadap perlembagaan negara. Aksi tersebut berhasil menggulingkan Perdana Menteri dan wakilnya. Akhirnya, sistem demokrasi berhasil ditegakkan kembali dan arus demokrasi berkembang dengan pesat. Akibat perkembangan sistem ini, masyarakat Muslim di Thailand Selatan mencoba mengambil langkah positif untuk kembali berperan dalam politik berparlemen dengan tujuan mendapatkan kekuasaan politik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, para pemimpin masyarakat Islam yang terdiri dari politikus dan pemuka agama membentuk Majelis Perhimpunan Umum di Patani, yang bertujuan membuat kesepakatan bersama untuk menghadapi Pemilihan Umum yang diadakan tahun 1976. Majelis tersebut telah menunjuk sembilan calon yang bertanding untuk memperebutkan kursi parlemen di keempat wilayah Thailand Selatan (Patani, Yala, Narathiwat dan Satun) dan satu kursi di Songkhla. Mereka bertanding atas nama Partai Demokrat (*Prachatipat*). Umat Islam di

⁷⁵Wan Kamal Mujani (Ed), *Minoriti Muslim Cabaran dan Harapan Menjelang Abad Ke 21*, (Bangi: Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah dan Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Univerisi Kebangsaan Malaysia, 2002), h. 40-47..

⁷⁶Wan Kamal Mujani (Ed), *Minoriti Muslim Cabaran dan Harapan Menjelang Abad Ke 21*, (Bangi: Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah dan Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Univerisi Kebangsaan Malaysia, 2002), h. 187-189.

⁷⁷Respon negatif terhadap perpolitikan dilakukan karena dianggap perjuangan melalui parlemen sudah tidak berarti lagi.

⁷⁸Ahmad Omar Chapakia, "Pembaharuan Politik Selatan Thai dan Perjuangan Masyarakat Islam", dalam Farid Mat Zain dan Zulkarnain Mohamed (Eds), *Muslim Selatan Thai: Konflik Dan Perjuangan*, (Selangor: Karisma Publications Sdn. Bhd. Shah Alam, 2008), h. 223.

wilayah selatan bersatu padu memberikan dukungan yang kuat dalam Pemilihan Umum tersebut, sehingga semua calon memenangkan Pemilu dan memperoleh suara mayoritas. Kemenangan tersebut juga terjadi pada calon Muslim di wilayah Pathlung dan Krabi. Hal ini merupakan pertama kali dalam sejarah politik Thailand yang mencatat kemenangan sebelas orang wakil rakyat Muslim yang mewakili tujuh wilayah.

Namun, pemerintahan de-mokrasi tersebut tidak dapat bertahan lama karena terjadi kudeta militer tahun 6 Oktober 1976. Kembalinya pihak militer yang berkuasa dalam politik Thailand, mengakibatkan banyak dari kalangan pejuang demokrasi ditangkap dan dibunuh, termasuk pemimpin masyarakat Islam di wilayah selatan yang terlibat dalam demonstrasi di Patani pada tahun 1975. Hal ini menimbulkan ketegangan politik di Thailand Selatan, bahkan lebih buruk dari sebelumnya.

Setelah menghadapi tantangan dan suasana tergang itu, pihak wakil rakyat Muslim mulai mengambil inisiatif untuk menyatukan kedudukan mereka di bawah satu wadah politik. Beberapa kali pertemuan yang diadakan dan berlanjut hingga 3 Mei 1986, tercapailah kesepakatan untuk membentuk kesatuan politik dengan nama "Wahdah", yang secara umum berfungsi untuk memajukan kehidupan masyarakat Muslim di seluruh wilayah Thailand.⁷⁹ Walau apapun yang terjadi di masa depan, perjuangan Muslim Patani akan terus berlanjut selama pemerintah Thai masih mendiskriminasi mereka.

D. Penutup

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjuangan Muslim Patani di Thailand Selatan berakar dari penaklukan kerajaan Siam atas kerajaan Patani. Semenjak itu, Patani tidak lagi menjadi kerajaan yang merdeka, akan tetapi menjadi kerajaan jajahan Siam. pada saat itu

Patani dikenakan bermacam-macam jenis eksploitasi dari kerajaan Siam.

Perjuangan umat Islam terhadap pemerintahan Thai muncul sebagai akibat akomodasi secara paksa (*coersion*) oleh pemerintah Thai terhadap masyarakat Patani yang mengakibatkan konflik di antara kedua belah pihak tersebut. Tujuan perjuangan yang dilakukan mengalami perubahan, yang dimulai dengan menuntut otonomi dan berubah untuk memperoleh kemerdekaan. Hal tersebut dilakukan karena untuk memperoleh otonomi tidak mungkin, maka mereka berjuang untuk merdeka dengan melakukan perjuangan bersenjata menentang pemerintah.

Perjuangan yang dilakukan oleh Muslim Patani mengalami beberapa perubahan, seperti perjuangan dari menuntut otonomi sampai menuntut kemerdekaan, dari perjuangan yang bersifat lunak hingga perjuangan dengan kekerasan dan menggunakan senjata. Perjuangan tersebut mengalami pasang surut dan mendapat berbagai tantangan, baik tantangan dari pihak luar seperti pemerintah Thai, maupun tantangan dari dalam, seperti adanya pengkhianat dalam perjuangan dan kurangnya dukungan dari sebagian masyarakat Muslim Patani.

Daftar Kepustakaan

- Al-Fatani, Ahmad Fathy, *Pengantar Sejarah Patani*, Alor Setar: Pustaka Darussalam, 1994.
- , *Ulama Besar dari Patani*, Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2002.
- Azra, Azyumardi, *Renaissance Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Hasbullah, Moeflich (Ed), *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2003.
- Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, Pekan Baru: Zanafa Publishing dan Nusa Media, 2011.

⁷⁹Farid Mat Zain dan Zulkarnain Mohamed (Eds), *Muslim Selatan Thai: Konflik Dan Perjuangan*, (Selangor: Karisma Publications Sdn. Bhd. Shah Alam, 2008), h. 223-226.

- Liow, Joseph Chinyong, *Islam, Education and Reform In Southern Thailand: Tradition and Transformation*, Singapore: ISEAS, 2005.
- Kettani, M. Ali, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mahmud, Nik Anuar Nik, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954*, Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2006.
- Mujani, Wan Kamal, *Minoriti Muslim: Cabaran dan Harapan Menjelang Abad Ke 21*, Bangi: Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah dan Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2002.
- Nik Mahmud, Nik Anuar, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954*, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 2006.
- Pitsuwan, Surin, *Islam Di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Saifullah, *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Syukri, Ibrahim, *Sejarah Kerajaan Melayu Patani*, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 2005.
- Thohir, Ajid, *Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam : Melacak Akar-Akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- , *Studi Kawasan Dunia Islam: Perspektif Etno-Linguistik dan Geo-Politik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Zain, Farid Mat, *Islam Di Tanah Melayu Abad Ke 19*, Selangor: Karisma Publications Sdn. Bhd. Shah Alam, 2007.
- , dkk, *Minoriti Muslim Di Thailand*, Selangor: L Minda Sdn. Bhd, 1988.
- , dan Zulkarnain Mohamed, *Muslim Selatan Thai: Konflik Dan Perjuangan*, Selangor: Karisma Publications Sdn. Bhd. Shah Alam, 2008.
- Fakhri, “Gerakan Dakwah Di Pattani”, *Jurnal Al-Bayan*, vol. 6, no. 6, Juli-Desember 2002, h. 23-36.
- Issundari, Sri, “Latar Belakang Kudeta Militer Thailand Pada Masa Pemerintahan PM Thaksin Sinawatra”, *Jurnal Hubungan Internasional UPN “Veteran” Yogyakarta*, vol. 12, no. 4, Desember 2008, h. 203-2011.
- Turmudzi, Endang, “Akar Konflik Etnik dan Agama di Thailand Selatan”, *Jurnal Harmoni*, vol. IX, no. 34, April-Juni 2010, h. 41-62.
- Wardhani, Baiq L.S.W., “Mengukur Probabilitas Keterlibatan Indonesia Dalam Resolusi Konflik Di Thailand Selatan”, *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, th. XXI, no. 1, Januari-Maret 2008, h. 77-84.
- Yuniarto, Paulus Rudolf, “Minoritas Muslim Thailand: Asimilasi, Perlawanan Budaya dan Akar Gerakan Separatisme”, *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, volume VII No I, 2005, h. 89-118.
- , “Integrasi Muslim Patani: Reidentitas Sosial atas Dominasi “Nasional” Thailand”, *Hermenia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, vol. 3, no. 2 Juli-Desember 2004, h. 151-170.